

## URGENSI BANK SENTRAL INDONESIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU INFLASI MELALUI SEKTOR RIIL

**Fani Andriani<sup>1</sup>**

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Program Studi Ekonomi Syariah<sup>1</sup>  
Email: [faniandini85@gmail.com](mailto:faniandini85@gmail.com)<sup>1</sup>

**Roni Mohamad<sup>2</sup>**

Dosen Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Program Studi Ekonomi Syariah<sup>2</sup>  
Email: [ronimohamad@iaingorontalo.ac.id](mailto:ronimohamad@iaingorontalo.ac.id)<sup>2</sup>

---

### **Keywords:**

*Bank Indonesia, Inflation,  
Real Sector*

---

### **ABSTRACT**

*Bank Indonesia is an independent institution that has the task of establishing and implementing monetary policy so that the rupiah's value remains stable and the inflation rate can be controlled to maintain and increase Indonesia's economic growth. This research is qualitative research with a descriptive method. This study aims to determine Bank Indonesia's urgency as the central bank in controlling the inflation rate through the real sector, namely through credit channels, interest rate regulation, asset price channels, exchange rate channels, and public expectations.*

---

### **Kata Kunci:**

Bank Indonesia, Inflasi,  
Sektor Riil

---

### **ABSTRAK**

Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sehingga nilai rupiah tetap stabil dan laju inflasi dapat dikendalikan dalam rangka menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengendalikan laju inflasi melalui sektor riil yaitu melalui saluran kredit, pengaturan tingkat suku bunga, saluran harga aset, jalur nilai tukar dan ekspektasi masyarakat.

---

## PENDAHULUAN

Bank Indonesia merupakan bank sentral Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Bank Indonesia sebagai lembaga independen mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor moneter sehingga stabilitas nilai rupiah dapat terjaga. Dengan demikian, diharapkan tingkat inflasi dapat dikendalikan sehingga daya beli masyarakat menjadi stabil.

Inflasi merupakan salah satu faktor penyebab ketidakstabilan ekonomi negara. Masalah inflasi tidak dapat dihindari oleh Indonesia karena perekonomian Indonesia masih bergantung pada sistem moneter dan perekonomian dunia. Kebijakan moneter merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas inflasi.



Dalam dunia ekonomi, inflasi berpengaruh negatif terhadap daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan pelemahan tingkat efisiensi dan produktivitas perekonomian, investasi, peningkatan biaya modal, serta ketidakjelasan biaya dan pendapatan di masa depan. Ketika inflasi terjadi, hal itu dapat mendistorsi harga relatif, suku bunga riil, tarif pajak, mengganggu pendapatan masyarakat, menghambat investasi, dan menciptakan ketidakpastian stabilitas ekonomi. Dengan demikian, penanggulangan inflasi merupakan salah satu sasaran utama kebijakan moneter. Pengaruh inflasi cukup besar terhadap kehidupan perekonomian, karena inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian dari para ekonom, pemerintah, dan kebijakan suatu negara. Berbagai teori, pendekatan dan kebijakan dikembangkan dalam upaya pengendalian inflasi pada tingkat yang diharapkan (Hariyanto, 2019).

Kebijakan moneter merupakan salah satu unsur kebijakan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kesulitan-kesulitan yang terkait dengan pencapaian berbagai tujuan kebijakan secara bersamaan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Kestabilan nilai rupiah yang menjadi tujuan utama kebijakan moneter adalah kestabilan harga barang dan jasa yang tercermin dari tingkat inflasi. Inflasi dapat terjadi karena banyaknya uang yang beredar dibandingkan dengan kemauan masyarakat untuk menabung dan memiliki uang (Malik, 2012).

Stabilitas nilai rupiah yang menjadi tujuan utama kebijakan moneter Bank Indonesia adalah stabilitas harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Menurut pendekatan moneter, inflasi dapat terjadi karena terlalu banyaknya uang yang beredar dibandingkan dengan keinginan masyarakat untuk memiliki dan menyimpan uang (Malik, 2012). Lenner (Gunawan, 1995) menjelaskan inflasi sebagai suatu keadaan ketika terjadi kelebihan permintaan atas barang dan jasa secara keseluruhan.

Sejak krisis moneter Indonesia yang terjadi pada tahun 1998, pemerintah menilai Bank Indonesia belum melakukan pengawasan dengan baik, sehingga pemerintah berencana membentuk lembaga khusus yang mengawasi sektor perbankan sehingga dibentuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertugas fokus pada pengawasan perbankan secara mikro sedangkan secara makro. fungsi makro tetap menjadi tugas Bank Indonesia.

Secara makroprudensial, fungsi Bank Indonesia adalah melakukan pengawasan terhadap sistem perbankan secara menyeluruh. Sedangkan tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah mengatur dan mengawasi bank secara individual. Apabila terdapat penyimpangan atau potensi risiko pada sistem perbankan yang ditemukan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi

permasalahan sistemik tersebut.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian, Fungsi dan Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum. Bank sentral merupakan lembaga yang secara alami berubah dari bank swasta dan kemudian berkembang menjadi lembaga independen yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi (Goodhart, 1985). Menurut Goodhart, perkembangan bank sentral terjadi secara alamiah dimana bank sentral menjembatani antara bank dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan bank sentral berada dalam posisi memiliki kekuatan politik sebagai bank pemerintah, dalam hal ini bank sentral memiliki kewenangan untuk mengatur peredaran uang dalam jumlah besar dan menjadikan bank sentral sebagai banker bank yaitu penyedia uang. likuiditas bagi bank, terutama pada saat bank mengalami kesulitan.

John Singleton (2011) mengemukakan salah satu definisi bank sentral dalam arti sempit dimana bank sentral adalah bank tempat bank lain menempatkan dana (rekening) dan menggunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir transaksi antar bank. Bank sentral merupakan lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mempengaruhi variabel ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, bank sentral merupakan lembaga pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang terfokus pada bidang moneter yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian yang terus berkembang akibat permasalahan perekonomian yang semakin kompleks.

Singleton,et. (2006), menyatakan bahwa terdapat 10 fungsi bank sentral sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga penerbitan uang sebagai alat pembayaran yang sah guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter.
3. Sebagai penyedia jasa perbankan, agen pemerintah, dan pengelola pinjaman pemerintah.
4. Custodian dari cadangan bank umum dan menyelesaikan transaksi kliring antarbank.
5. Menjaga kestabilan sistem keuangan serta bertindak sebagai pengawas perbankan.
6. Sebagai kustodi dari cadangan devisa negara dan membantu dalam mengelolanya sebagai pelaksanaan dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar.
7. Menjalankan mandat lebih luas untuk memperkuat pembangunan ekonomi sehingga bertugas sebagai pembuat kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Terutama dinegara berkembang seperti Indonesia.
8. Karena dipandang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang ekonomi maka Bank sentral bertugas sebagai penasihat pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi.
9. Sebagai lembaga yang bisa berpartisipasi dalam kerjasama untuk pengaturan moneter internasional.
10. Bank sentral adalah lembaga yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah sehingga memungkinkan bank sentral mendapat tugas lain, seperti memberi 24 layanan perbankan kepada publik dan memberikan perlindungan kepada nasabah atau sebagai operator registry saham, (Simorangkir, 2014).

Menurut Chandavarkar (1996) kebijakan bank sentral pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, menjaga stabilitas neraca pembayaran, membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan umum. Sehingga dapat mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang barang dan jasa, dan kestabilan nilai mata uang asing. Aspek kestabilan nilai mata uang barang dan jasa tercermin dari perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kestabilan nilai mata uang asing tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus memperhatikan seluruh kebijakan umum pemerintah di bidang ekonomi. Sesuai Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki tiga tugas yang dinamakan sebagai Tiga Pilar Bank Indonesia, yakni:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.  
Adapun wewenang yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:
  - a. Menetapkan sasaran-sasaran dari moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
  - b. Melaksanakan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam rupiah maupun mata uang asing.
  - c. Menetapkan tingkat diskonto, cadangan giro wajib minimum serta mengatur kredit atau pembiayaan perbankan.
2. Mengatur, mengelola dan menjaga kelancaran sistem pembayaran  
Adapun wewenang yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
  - b. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya dan menetapkan penggunaan alat/ instrument pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi bank-bank  
Adapun wewenang yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:
  - a. Menetapkan peraturan untuk perbankan
  - b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank-bank.
  - c. Mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan
  - d. Mengenaikan sanksi terhadap bank yang melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Bank Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, kedudukan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai lembaga negara yang mandiri yang bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain. Pihak kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia berhak dan berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Kedudukan dan

kedudukan Bank Indonesia diperlukan agar Bank Indonesia lebih efektif dan efisien dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan undang-undang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri di dalam dan di luar pengadilan.

### Inflasi

Boediono (1982) berpendapat, jika terjadi kenaikan harga satu atau dua barang saja, tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan itu terjadi secara luas atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar harga barang dan jasa lainnya. Sedangkan menurut Putong, inflasi adalah kenaikan harga komoditas secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya program pengadaan komoditas dalam hal ini produksi, penetapan harga, pencetakan uang, dan sebagainya dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menghitung inflasi, dan link ke SEKI-CPI metadata. CPI adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang digunakan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. CPI merupakan salah satu indikator untuk mengukur inflasi.

Inflasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yakni:

1. Jenis inflasi menurut sifatnya

Menurut sifatnya, inflasi terbagi atas:

- Inflasi ringan, yakni inflasi yang di tandainya dengan laju inflasi yang cenderung rendah dengan nilai satu digit pertahun atau kurang dari 10%.
- Inflasi sedang, yaitu inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup tinggi dan bernilai dua digit yaitu antara angka 10- < 30% dan terjadi dalam waktu yang relatif pendek.
- Inflasi tinggi yakni inflasi yang terjadi sangat parah akibatnya karena kenaikan harga yang lebih dari 30%.

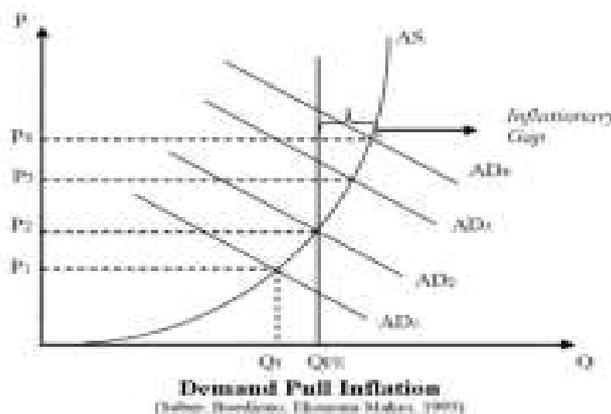
2. Jenis inflasi menurut penyebabnya:

Menurut penyebabnya, inflasi terdiri menjadi:

a. *Demand-Pull Inflation*

Adalah inflasi yang terjadi karena adanya permintaan agregat dari masyarakat yang berlebih, sedangkan dari segi produksi kesempatan kerja mendekati pada kondisi penuh.

*Demand-Pull Inflation* dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.



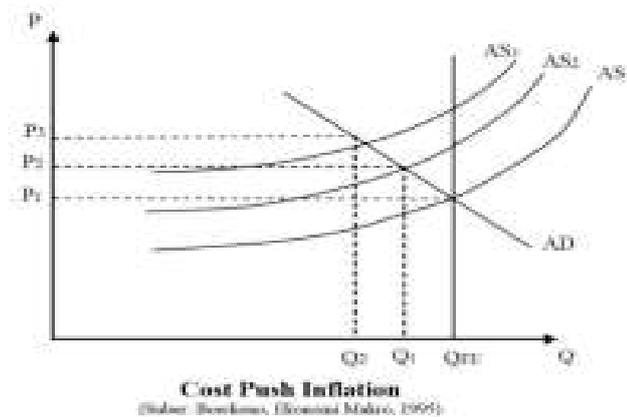
Gambar 1: Grafik *Demand-Pull Inflation*

Dari grafik diatas dijelaskan bahwa harga pada  $P_1$  dan output  $Q_1$  sebagai permulaan. Kemudian terjadi kenaikan permintaan agregat dari  $AD_1$  ke  $AD_2$  sehingga permintaan tidak dapat dipenuhi oleh produksi atau penawaran yang ada. Akibatnya harga menjadi naik di titik  $P_2$  dan output naik menjadi  $QFE$ .

b. *Cost- Push Inflation*

Adalah inflasi yang terjadi atas kenaikan harga akibat dari menurunnya jumlah produksi. Kondisi ini terjadi akibat adanya kenaikan biaya produksi. Faktor yang menyebabkan inflasi dari sisi penawaran adalah kenaikan upah tenaga kerja, kenaikan BBM dan kenaikan tarif listrik serta beberapa variable lain penyebab kenaikan biaya produksi, dan sebagainya.

*Cost- Push Inflation* dapat dijelaskan melalui grafik dibawah ini



**Gambar 2: Grafik *Cost- Push Inflation***

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa titik bermula pada harga  $P_1$  dan produksi  $QFE$ . Kenaikan biaya produksi akan menggeser kurva penawaran agregat dari  $AS_1$  menjadi  $AS_2$ . Konsekuensi yang terjadi adalah harga naik menjadi  $P_2$  dan produksi turun menjadi  $Q_1$ . Kenaikan harga selanjutnya akan menggeser kurva  $AS$  menjadi  $AS_3$ , harga naik dan produksi turun menjadi  $Q_2$ .

### Sektor Riil

Sektor riil adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan perekonomian di masyarakat yang sangat berpengaruh atau keberadaannya dapat dijadikan tolok ukur untuk dapat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Direktorat Keuangan Negara-BAPENAS menyampaikan bahwa sektor riil adalah segala bentuk kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan permintaan agregat dan penawaran agregat. Sektor riil adalah sektor riil, yaitu sektor yang menghasilkan barang dan jasa di masyarakat. Apabila suatu negara mengalami kenaikan harga di sektor riil, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan ekonomi di negara tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bertumpu pada sektor riil, (Syauqi, 2016). Contoh dari sektor riil seperti pertanian, pertambangan dan industri ditambah dengan kegiatan yang berkaitan dengan jasa wisata internasional. Dimana semuanya diproduksi langsung dengan bantuan sumber daya

manusia dan mereka mendapatkan upah dari pekerjaan ini.

Istilah sektor riil dalam ekonomi makro menggambarkan kondisi ekonomi dalam hal permintaan dan penawaran barang dan jasa (Suprayitno, 2005). Ekonomi pasar yang ideal adalah ekonomi di mana ada pertukaran barang dan jasa secara sukarela dengan menggunakan uang sebagai perantara harga pasar. Di dunia nyata, tidak ada perekonomian yang benar-benar ideal dan bisa berjalan mulus. Yang sering terjadi adalah setiap pasar memiliki ketidaksempurnaan, menyebabkan kurangnya kesempatan kerja dan kemiskinan yang ekstrim di masyarakat, (Samuelson, 2003). Di sektor ekonomi riil, kebijakan moneter pemerintah mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, serta pertumbuhan ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memotret dan mengeksplorasi sesuatu yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Melalui metode ini data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, selanjutnya diintegrasikan sehingga menjadi sebuah gambaran yang jelas dan terarah menyangkut masalah yang akan diteliti. Menurut Lexy J. Moleong, bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata tertulis, atau gambar, dan bukan berupa angka-angka, (Moleong, 2007). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data yang relevan dengan objek yang diteliti. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh kesimpulan akhir bagaimana urgensi Bank Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi. Dan juga untuk memperkuat dan mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengendalian Inflasi

Tingkat harga merupakan indikator penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Karena tingkat harga dapat menjaga keseimbangan dalam alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengaburkan atau bahkan menghilangkan indikator-indikator ini dan mendistorsi harga. Hal ini akan mempersulit perencanaan dan tidak menyebabkan menurunnya motivasi masyarakat maupun dunia usaha untuk menabung dan berinvestasi. Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata pada hakekatnya merupakan tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena dapat menggambarkan secara riil keberhasilan pembangunan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat. Parameter untuk mengukur tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dapat dilihat dari adanya sumber daya manusia yang berkualitas, (Triwahyuni, 2021).

Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali jika kenaikan itu meluas (atau menyebabkan kenaikan harga) ke barang lain. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penetapan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memantau perkembangan harga barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, pasar tradisional dan pasar modern untuk

beberapa jenis barang atau jasa di setiap kota.

Inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi *supply* atau *shocks*, seperti kenaikan harga minyak dunia dan gangguan panen atau banjir. Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh supply dan shock factor diwakili oleh kelompok volatile food dan administered prices yang mencapai sekitar 40% dari bobot IHK, (Bank Indonesia). Dengan demikian, kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi relatif terbatas pada saat terjadi guncangan yang sangat besar, seperti pada saat kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008 yang menyebabkan lonjakan inflasi.

Mengingat tingkat inflasi juga dipengaruhi oleh *shock factor* tersebut, maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan ekonomi makro yang terintegrasi dari kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral. Selain itu, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap guncangan dari sisi penawaran memerlukan kebijakan khusus untuk masalah ini. Di tingkat teknis, koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penargetan, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI terdiri dari Bank Indonesia dan kementerian teknis terkait di Pemerintah seperti seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008, pembentukan TPI diperluas hingga ke tingkat daerah. Ke depan, diharapkan koordinasi antara Pemerintah dan BI akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik di pusat maupun di daerah, sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang berujung pada keberlanjutan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

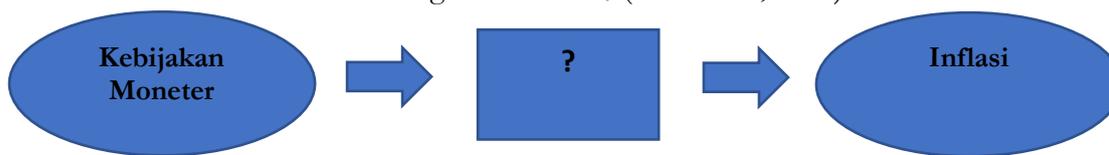
### **Transmisi Kebijakan Bank Indonesia pada Sektor Riil**

Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter bank sentral mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan yang pada akhirnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter baik OPT maupun lainnya dalam menjalankan kebijakan moneternya. Tindakan tersebut kemudian mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Di sektor ekonomi riil, kebijakan moneter selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, serta pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter., (Bank Indonesia, 2004).

Menurut Taylor, mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah (*channels*) yang melaluinya kebijakan moneter dapat mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter (Hardianto, 2004). Mekanisme transmisi kebijakan moneter standar dimulai dari tindakan Bank Sentral melalui perubahan (*shock*) instrumen kebijakan moneter. Tindakan ini kemudian mempengaruhi target operasional dan target menengah, yang pada gilirannya mempengaruhi tujuan akhir dari kebijakan moneter (*final target*), (Hasibuan, 2013).

Bernanke dan Gertler (1995) berpendapat bahwa banyak penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa perubahan kebijakan moneter akan diikuti oleh perubahan sektor riil atau perubahan output, namun bagaimana mekanisme kebijakan moneter dapat mempengaruhi sektor riil masih belum diketahui. Hal inilah yang menyebabkan

mekanisme transmisi disebut sebagai “*black box*”, (Wulandari, 2015).



Bank sentral mempunyai fungsi untuk mengatur sistem perbankan dalam suatu negara guna mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih stabil. Bank Sentral juga menentukan arah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan mata uang dan tingkat inflasi yang mungkin terjadi. Dalam mengendalikan sektor moneter Bank Indonesia memiliki wewenang dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui instrumen: (Karim, 2007).

#### 1. Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*)

Bank Indonesia dapat mempengaruhi sasaran operasionalnya melalui instrumen Operasi Pasar Terbuka, yaitu suku bunga atau jumlah uang beredar secara lebih efektif sebab pelaksanaannya dapat dilakukan secara terbuka dan pembentukan suku bunganya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Operasi Pasar Terbuka juga dapat dimulai oleh Bank Indonesia pada frekuensi dan kuantitas yang diinginkan. Operasi Pasar Terbuka dalam bentuk pembelian dan penjualan surat berharga (sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang) oleh bank Indonesia di pasar perdana dan pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau non-lelang.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang maka bank sentral akan membeli obligasi, dan sebaliknya bila akan menurunkan jumlah uang beredar maka bank sentral akan menjual obligasi.

Dalam hal ini, pemerintah menjual dan membeli surat-surat utang pemerintah kepada bank-bank komersil atau pihak-pihak lainnya di dalam negeri. Pembayaran-pembayaran yang diterima berarti pemerintah menyedot uang dari masyarakat. Pembelian surat-surat utang pemerintah berarti uang dilempar pemerintah ke dalam masyarakat sehingga memperbesar jumlah uang yang beredar, (Arief, 1996).

#### 2. Penentuan Cadangan Wajib Minimum (GWM)

Cadangan wajib minimum merupakan sejumlah alat likuiditas minimum sehingga wajib dipelihara oleh bank. Cadangan wajib minimum ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

##### a. Cadangan Primer

Cadangan primer disebut juga cadangan wajib. Cadangan primer merupakan instrument yang tidak langsung dan merupakan peraturan bank sentral yang mengharuskan bank-bank untuk memelihara beberapa instrumen likuiditas yang sama dengan persentase tertentu dari kewajiban kas mereka saat ini dan rekening penyelesaian dengan bank sentral.

##### b. Cadangan Sekunder

Cadangan sekunder adalah jalur kredit dari Bank Sentral ke bank-bank yang dijamin dengan surat berharga dan tingkat diskonto yang ditentukan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter.

### 3. Kebijakan Diskonto

Kebijakan ini adalah pemberian Bank sentral atas jasa peminjaman atau penyimpanan kepada bank dengan tingkat diskonto dan jaminan atas surat berharga yang telah ditentukan oleh Bank Sentral sesuai dengan kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan mempengaruhi permintaan kredit dari perbankan. Dalam hal bank sentral ingin menaikkan suku bunga, bank sentral dapat memberi sinyal melalui kenaikan suku bunga (diskonto) pinjaman. Tingkat diskonto di atas atau di bawah tingkat bunga pasar uang. Jika bank sentral menaikkan suku bunga pinjaman, bank sentral menaikkan tingkat diskonto atau sebaliknya. Alat ini berfungsi sebagai gerbang pengaman untuk menjaga stabilitas di pasar uang, sehingga bank diharapkan agar tidak sering menggunakan alat ini.

### 4. Imbauan (*moral persuasion*)

Imbauan (*moral persuasion*) merupakan alat dimana bank sentral dapat mendesak bank untuk menerapkan kebijakan tertentu. Hal ini tidak mengikat namun sebagai lembaga yang kredibel imbauan bank sentral biasanya cukup efektif dalam mempengaruhi kebijakan moneter.

Transmisi kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi telah lama dikenal berlangsung dengan tenggat waktu yang panjang dan bervariasi (Friedman dan Schwartz, 1963). Hal ini karena transmisi moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam kondisi perekonomian yang masih tradisional dan tertutup dengan bank sebagai satu-satunya lembaga keuangan, hubungan antara jumlah uang beredar dengan kegiatan ekonomi riil secara umum masih relatif erat. Dengan semakin majunya sektor keuangan, hubungan antara jumlah uang beredar dan sektor riil dapat diregangkan. Sebagian dana yang dimobilisasi oleh lembaga keuangan dapat terus beredar di sektor keuangan saja dan tidak berpengaruh pada sektor riil. Pola hubungan variabel ekonomi dan keuangan yang berubah dan semakin terputus jelas akan mempengaruhi lamanya batas waktu mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Stabilitas sektor moneter yang secara garis besar digambarkan dengan terjaganya suku bunga, stabilnya nilai tukar dan stabilnya tingkat inflasi yang rendah, akan mempengaruhi pergerakan ekonomi di sektor riil. Transmisi Kebijakan moneter yang sangat berkaitan dengan sektor riil melalui jalur berikut :

#### 1. Saluran Kredit

Transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan dapat dijelaskan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah transmisi di sektor keuangan yang terjadi di pasar uang karena bank sentral menerapkan kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter tahap kedua dari sektor perbankan ke sektor riil terjadi di pasar kredit. Besarnya kredit yang disalurkan perbankan akan mempengaruhi sektor riil (*output*) dan inflasi melalui perkembangan investasi dan perkembangan konsumsi. Melalui perkembangan investasi, volume kredit perbankan dan suku bunga kredit yang merupakan biaya modal mempengaruhi permintaan investasi dan kegiatan produksi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung et al (2002) secara keseluruhan memberikan bukti empiris yang lengkap mengenai pengoperasian saluran kredit perbankan (*banks lending channel*) dalam transmisi moneter di Indonesia sebelum dan sesudah krisis. Mengingat ketergantungan debitur terhadap kredit perbankan, maka penelitian ini lebih memfokuskan pada pertanyaan apakah kebijakan moneter berpengaruh besar terhadap volume kredit perbankan. Bukti dari analisis data agregat menunjukkan bahwa kebijakan moneter berpengaruh

terhadap kredit bank dengan tenggat waktu karena kemampuan bank untuk menghindari penurunan volume simpanan dengan menjual sekuritasnya. Hal ini dilakukan bank untuk memenuhi komitmen kredit yang telah dibuat sebelum adanya perubahan kebijakan moneter.

2. Pengaturan tingkat suku bunga

Suku bunga merupakan faktor penting dalam perekonomian suatu negara karena sangat mempengaruhi “kesehatan” suatu perekonomian. Hal ini tidak hanya mempengaruhi keinginan konsumen untuk membelanjakan atau menyimpan uangnya tetapi juga mempengaruhi dunia usaha dalam mengambil keputusan.

Jalur suku bunga (*interest rate channel*) menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan untuk berbagai kegiatan ekonomi di sektor riil. Warjiyo dan Solikin (2003) berpendapat bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. Pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan ke suku bunga jangka menengah atau panjang melalui mekanisme penyeimbangan pada sisi penawaran dan permintaan pasar uang. Perkembangan suku bunga ini akan mempengaruhi biaya modal yang selanjutnya akan mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi yang merupakan komponen permintaan agregat. Lebih lanjut Maski (2007) mengemukakan bahwa perubahan suku bunga berdampak langsung pada *cost of credit* dan *cash flow*. Kebijakan moneter yang ditandai dengan sinyal perubahan jumlah uang beredar, dengan mengnggap bahwa formasi permintaan adalah tertentu (*given*), mendorong perubahan suku bunga di pasar keuangan. Berikutnya, *inter bank rate* akan berubah dan ini akan merubah pula *bank loan rate* yang merupakan biaya atau harga yang dikenakan pada peminjam/investor.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Kusmiarso et al (2002) mendokumentasikan bukti empiris mengenai operasi transmisi jalur suku bunga pada periode pra-krisis dan pasca-krisis. Hal ini dilakukan dengan menganalisis bagaimana biaya modal serta efek substitusi dan pendapatan mentransmisikan perubahan suku bunga yang terjadi akibat kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Bukti empiris menunjukkan bahwa pada periode sebelum krisis, suku bunga riil untuk deposito dan pinjaman investasi dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan suku bunga PUAB. Namun demikian, pertumbuhan investasi tidak sensitif terhadap perkembangan suku bunga kredit, terutama karena relatif mudahnya akses perbankan dan dunia usaha terhadap dana asing pada saat itu. Sedangkan penetapan suku bunga kredit perbankan dipengaruhi oleh suku bunga simpanan dan kondisi likuiditas. Sebelum krisis, bank memiliki akses dana dalam jumlah besar baik dari luar negeri maupun dari bank sentral dan PUAB sehingga likuiditas tidak menjadi faktor dominan dalam suku bunga kredit. Namun pasca krisis, likuiditas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi suku bunga kredit, khususnya bagi bank swasta nasional. Sedangkan untuk bank asing dan bank campuran, likuiditas masih belum menjadi faktor dominan dalam menentukan suku bunga kredit karena kemampuan mereka mengakses dana dari luar negeri..

3. Saluran harga aset

Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset (*assets price channel*) menekankan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat, yang kemudian mempengaruhi investasi dan

konsumsi. Jika bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraktif, hal ini akan mendorong kenaikan suku bunga, dan pada gilirannya akan menekan harga aset perusahaan. Penurunan harga aset dapat mengakibatkan dua hal, yaitu menurunkan kemampuan perusahaan untuk berekspansi dan menurunkan nilai aset yang pada akhirnya akan mengurangi pengeluaran konsumsi. Secara bersama-sama, kedua faktor ini menghasilkan penurunan pengeluaran agregat

Tujuan transmisi kebijakan moneter melalui harga aset di sektor riil adalah untuk mengkonfirmasi dampaknya terhadap investasi melalui teori  $q$  Tobin. Untuk investasi bisnis, Tobin- $q$  didefinisikan sebagai rasio nilai pasar bisnis dibagi dengan biaya rekapitalisasi. Ketika Tobin's  $q$  tinggi (misalnya, nilai pasar perusahaan tinggi karena ekonomi meningkat dan/atau suku bunga turun, sehingga biaya rekapitalisasi juga turun), investasi perusahaan akan meningkat. pinjaman bank untuk membiayai investasi. Analisis serupa dapat diterapkan pada investasi dalam rumah tangga seperti real estat. Hal ini disebabkan oleh kenaikan tajam harga aset akibat penurunan suku bunga kredit (Warjiyo & Juhro, 2020). Penurunan harga aset mempengaruhi belanja modal perusahaan. Turunnya harga aset mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperluas atau mengurangi investasinya (Juhro, 2020). Naiknya suku bunga menyebabkan kenaikan biaya modal yang harus diinvestasikan dalam produksi dan investasi. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) untuk komponen bangunan digunakan sebagai proxy untuk investasi, karena PMTB terbentuk sebagai hasil dari kegiatan investasi dan sebagian dari investasi digunakan untuk kegiatan manufaktur perusahaan. Penurunan pengeluaran konsumsi dan investasi menyebabkan penurunan permintaan agregat dan output, yang mempengaruhi inflasi.

#### 4. Jalur Nilai Tukar

Mekanisme transmisi melalui jalur nilai tukar menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Pengaruh aset keuangan berupa mata uang asing yang timbul dari kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain menjadikan jalur nilai tukar penting dalam transmisi kebijakan moneter. Efek ini tidak hanya terjadi pada perubahan nilai tukar tetapi juga pada aliran dana yang besar akibat perdagangan luar negeri dan aliran modal investasi di neraca pembayaran. Perkembangan nilai tukar dan aliran dana asing kemudian akan mempengaruhi output riil dan inflasi negara yang bersangkutan.

#### 5. Mempengaruhi pembentukan ekspektasi masyarakat

Mekanisme transmisi melalui jalur ekspektasi menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi terkait inflasi dan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan permintaan agregat dan inflasi. Ekspektasi inflasi umumnya dipengaruhi oleh perkembangan inflasi yang terjadi (inersia) dan juga kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral, yang dapat dilihat pada perkembangan suku bunga dan nilai tukar. Semakin kredibel kebijakan moneter yang antara lain tercermin dari kemampuan pengendalian suku bunga dan stabilisasi nilai tukar, maka akan semakin kuat pengaruhnya terhadap ekspektasi inflasi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan krisis ekonomi telah mengubah perilaku ekspektasi inflasi di Indonesia, Wuryandani dkk (2002) memfokuskan studi untuk menganalisis bekerjanya transmisi moneter melalui saluran ekspektasi

inflasi untuk periode setelah krisis. Dengan menggunakan data ekspektasi inflasi dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia untuk periode dari Juli 1997 sampai dengan Desember 2000, studi tersebut menyimpulkan bahwa ekspektasi inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar, inflasi pada periode yang lalu (*inertia*), dan perkembangan suku bunga. Bukti empiris ini juga didukung oleh hasil survei pada bank-bank, perusahaan, dan rumah tangga.

Peranan inflasi periode lalu dalam pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat menunjukkan pentingnya peningkatan efektivitas kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi. Kajian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan moneter Bank Indonesia dan membentuk ekspektasi inflasi dari inflasi aktual. Dengan demikian, apabila efektivitas kebijakan moneter dapat ditingkatkan dan berhasil menekan inflasi ke tingkat yang rendah, maka ekspektasi inflasi juga akan menurun dan selanjutnya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi.

Di sisi lain, pengaruh nilai tukar terhadap pembentukan ekspektasi inflasi cenderung asimetris. Bagi perusahaan terdapat kekakuan harga ke bawah dalam pola pembentukan harga yang dilakukan oleh perusahaan, dalam artian perusahaan cenderung enggan menurunkan harga jika terjadi apresiasi nilai tukar rupiah. Sebaliknya, depresiasi nilai tukar yang melampaui level tertentu akan diikuti oleh kenaikan harga oleh perusahaan. Dari sisi rumah tangga, perilaku asimetris juga terjadi pada pembentukan ekspektasi inflasi, dalam arti depresiasi akan diikuti dengan kenaikan ekspektasi inflasi sedangkan apresiasi tidak selalu diikuti dengan penurunan ekspektasi inflasi. Bukti empiris tersebut semakin mempertegas pentingnya Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, baik karena pengaruhnya terhadap pembentukan ekspektasi inflasi maupun mengingat pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap inflasi seperti pada jalur nilai tukar di atas.

Hal-hal tersebut di atas sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi di sektor riil. Karena pembiayaan di sektor riil seringkali bergantung pada suku bunga kredit perbankan. Naiknya harga bahan baku tentu akan menyulitkan produsen dalam melakukan produksi. Hal ini menjadi sangat rentan terjadi penurunan kegiatan produksi hingga terhentinya kegiatan usaha masyarakat. Kegiatan ekonomi di sektor riil terkait dengan sektor moneter. Proses kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi akan selalu dipengaruhi oleh kondisi di bidang moneter. Keterkaitan kedua sektor ini dapat digambarkan dengan fakta bahwa masyarakat melakukan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi uang, sehingga sektor tersebut stabil.

Kebijakan moneter akan menentukan keputusan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Suku bunga bank juga akan mempengaruhi keputusan produsen untuk mengajukan kredit guna membiayai produksi. Kondisi keuangan seringkali menyulitkan produsen skala kecil dan menengah karena persaingan dengan industri besar seringkali merugikan produsen kecil. Dengan kondisi tersebut, produsen kecil akan rentan untuk terus bertahan dalam persaingan. Untuk itu, kredit merupakan upaya yang dapat dilakukan produsen sebagai pembiayaan untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi. Stabilitas sektor moneter akan menentukan kondisi perekonomian secara luas, salah satunya akan mempengaruhi kondisi kegiatan perekonomian sektor riil. Sehingga pentingnya pengendalian dan pengawasan melalui kebijakan di bidang moneter secara tidak langsung akan mengendalikan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank

Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2022 – 2024, masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5%, dengan deviasi masing-masing  $\pm 1\%$ .

Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonominya di masa mendatang, sehingga tingkat inflasi dapat terjaga pada tingkat yang rendah dan stabil. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Sasaran atau sasaran inflasi tersebut dapat dilihat pada website Bank Indonesia atau website instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, atau Bappenas. Sebelum UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan setelah UU tersebut, untuk meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia, Pemerintah menetapkan sasaran inflasi.

## PENUTUP

Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang merupakan bank sentral Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bidang moneter sehingga stabilitas nilai rupiah dapat terjaga. Dengan demikian, diharapkan tingkat inflasi dapat dikendalikan sehingga daya beli masyarakat menjadi stabil.

Inflasi adalah gejala di mana tingkat harga umum atau keseluruhan meningkat terus menerus selama periode waktu tertentu. Tingkat inflasi merupakan cerminan dari harga. Kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan untuk mengelola tekanan harga yang bersumber dari sisi permintaan agregat (*demand management*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak dimaksudkan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor kejutan dan sementara yang akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran atau kejutan (*shocks*).

Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Dalam pengendalian bidang moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui instrumen operasi pasar terbuka, penetapan giro wajib minimum, kebijakan diskon dan himbauan. Stabilitas sektor moneter yang secara garis besar digambarkan dengan terjaganya suku bunga, stabilnya nilai tukar dan stabilnya tingkat inflasi yang rendah, akan mempengaruhi pergerakan ekonomi di sektor riil. Transmisi Kebijakan moneter terkait erat dengan sektor riil melalui saluran kredit, pengaturan suku bunga, saluran harga aset, saluran nilai tukar, dan ekspektasi publik.

Sasaran inflasi adalah tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Sasaran inflasi yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan

ekonominya di masa mendatang, sehingga tingkat inflasi dapat terjaga pada tingkat yang rendah dan stabil. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. 1996. *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Bank Indonesia, Inflasi, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>, diakses tanggal 26 September 2022, pukul 23.36 Wita. Hariyanto,
- Bank Indonesia, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Nomor 11, 2004
- Boediono. 1982. *Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) UGM.
- Hasibuan, Saida. 2013. *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Suku Bunga SBI Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter dan Variabel Makroekonomi Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1, Nomor 12
- Juhro, S. M. 2020. *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Kebijakan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmanto. 2007. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta; Rajagrafindo Persada,
- Kusmiarso, Bambang, Elizabeth Sukowati, Andry Prasmuko, Sudiro Pambudi, Dadal Angkoro, Iss Savitri Hafid. 2002. "Interest Rate Channel of Monetary Transmission in Indonesia" dalam Perry Warjiyo dan Jуда Agung (editor). *Transmission Mechanism of Monetary Policy in Indonesia*. Bank Indonesia: Jakarta
- Mashudi. 2019. Perspektif Inflasi dalam Ekonomi Islam, *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2
- Mishkin, F. 1995. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 4th edition, New York: Harper Collins.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Perry Warjiyo dan Jуда Agung (editor Asset Price Channel of Monetary Policy Transmission Mechanism in Indonesia. dalam). *Transmission Mechanism of Monetary Policy in Indonesia*. Bank Indonesia: Jakarta,
- Samuelson, Paul A. 2003. *Ilmu Mikroekonomi*. PT. Media Global Edukasi
- Simorangkir, Iskandar. 2014. *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Syauqi, Irfan. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Triwahyuni. 2021. Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam, *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 2.
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M. 2020. *Kebijakan Bank Sentral Teori dan Praktik*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wulandari, Erika Putri. 2015. Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit Perbankan Dalam Mencapai Sasaran Akhir Inflasi (Periode 2005:Q1 – 2014:4), *Jurnal Ilmiah*, Universitas Brawijaya
- Wuryandani, Gantiah, Abdul M. Ikram, and Tri Handayani. 2001. "Monetary Policy Transmission through Inflation Expectation Channel" dalam Perry Warjiyo dan Jуда Agung (editor). *Transmission Mechanism of Monetary Policy in Indonesia*. Bank Indonesia: Jakarta